

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kota Rembang

Kabupaten Rembang, terletak di Provinsi Jawa Tengah, menempati bagian timur laut provinsi tersebut. Secara geografis kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Blora di selatan, Kabupaten Pati di barat, dan Kabupaten Tuban di Provinsi Jawa Timur di timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Rembang terletak di Kecamatan Rembang. Dengan luas sekitar 1.014,08 kilometer persegi, kabupaten ini berpenduduk sekitar 635.796 jiwa, terdiri dari 316.626 laki-laki dan 319.170 perempuan.

**Gambar 2.1**  
**Peta wilayah Kab. Rembang**



Sumber: <https://rembangkab.go.id/peta/>

Informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan, 287 desa, dan 7 kecamatan. Kecamatan tersebut diantaranya adalah Kabupaten Rembang yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Rembang.

### **2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Rembang**

Kabupaten Rembang yang bercirikan semboyan “Rembang BANGKIT” (Bahagia, Aman, Nyaman, Gotong Royong, Kerja Keras, Iman, Takwa), terletak di Provinsi Jawa Tengah. Berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, dan Kabupaten Pati di barat. Secara geografis kabupaten ini terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui oleh Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), dengan koordinat berkisar antara 111<sup>o</sup> 00' – 111<sup>o</sup> 30' Bujur Timur dan 6<sup>o</sup> 30' – 7<sup>o</sup> 6' Lintang Selatan. Karena letaknya yang dekat dengan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Rembang menjadi pintu gerbang timur menuju Provinsi Jawa Tengah.

Bagian selatan Kabupaten Rembang bercirikan daerah perbukitan yang merupakan bagian dari Pegunungan Kapur Utara. Titik tertinggi di kawasan ini adalah Gunung Butak, yang tingginya 679 meter di atas permukaan laut. Selain itu, di wilayah utara terdapat perbukitan dengan puncak tertinggi Gunung Lasem, mencapai 806 meter di atas permukaan laut, dan saat ini ditetapkan sebagai bagian dari Cagar Alam Gunung Butak. Kabupaten Rembang memiliki luas wilayah sekitar 101,408 hektar, dengan luas sawah sekitar 28,65% (sekitar 29,058 hektar), lahan non-pertanian seluas 39,38%

(sekitar 39,938 hektar), dan lahan non-pertanian lainnya seluas 31,96% (sekitar 32,412 hektar). hektar) dari luas total.

Berdasarkan data tata guna lahan, lahan tegalan merupakan jenis lahan yang dominan dengan luas 32,94%, disusul hutan seluas 23,45%, dan sawah tadah hujan seluas 20,08%. Data Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang, luas wilayah sekitar 11.973 hektare berada pada ketinggian 0-7 meter di atas permukaan laut (dpl), 56.197 hektar berada pada ketinggian 8-100 meter dpl, 28.688 hektar berada pada ketinggian 101 -500 meter dpl, dan 3.112 hektar pada ketinggian melebihi 500 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2013, terjadi peningkatan jumlah hari hujan dan curah hujan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dimana Kecamatan Sulang mencatat curah hujan tertinggi sebesar 2.305 mm, dan Kecamatan Bulu mencatat jumlah hari hujan tertinggi yaitu sebanyak 131 hari.

a. Batas administratif Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut.

- Di bagian utara : terdapat Laut Jawa.
- Di sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Tuban, yang berada di Provinsi Jawa Timur.
- Di sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Pati.
- Di sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Blora.

b. Jarak ke beberapa kota lain di Pulau Jawa adalah sebagai berikut.

- Jakarta : 594 km
- Bandung : 476 km
- Semarang : 111 km

- Surabaya : 203 km
- Surakarta : 213 km
- Tuban : 115 km
- Pati : 36 km
- Kudus : 60 km
- Blora : 37 km
- Grobogan : 108 km

Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan, 287 desa, dan 7 kelurahan. Dari seluruh wilayah tersebut, Kecamatan Sale memiliki luas wilayah terluas yakni 10.714 hektar, disusul Kecamatan Bulu dengan luas 10.240 hektar. Tabel dibawah ini menyajikan data luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang:

**Table 2.1**  
**Data mengenai luas wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang**

No	Kecamatan Distric	Luas Area (m2)
1.	Sumber	7.673
2.	Bulu	10.240
3.	Gunem	8.020
4.	Sale	10.714
5.	Sarang	9.133
6.	Sedan	7.964
7.	Pamotan	8.156
8.	Sulang	8.454
9.	Kaliori	6.150
10.	Rembang	5.881

11.	Pancur	4.594
12.	Kragan	6.166
13.	Sluke	3.759
14.	Lasem	4.504

Sumber: <https://rembangkab.go.id/geografis/>

## 2.2 Gambaran Umum Kecamatan Rembang

Berdasarkan data BPS Kabupaten Rembang tahun 2019, luas wilayah Kabupaten Rembang kurang lebih 58,81 kilometer persegi. Pusat kecamatan ini terletak pada ketinggian sekitar 6 meter di atas permukaan laut, dengan rata-rata curah hujan tahunan sekitar 66 milimeter. Jarak dari pusat kecamatan ke ibu kota Kabupaten Rembang kurang lebih  $\pm$  1 kilometer yang dihubungkan melalui jalan Kabupaten. Batas-batas kabupaten diuraikan sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kaliiori
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, dan Kecamatan Pamotan
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sulang, dan Kecamatan Pamotan

Kabupaten Rembang meliputi 27 desa yaitu: Kedungrejo, Turusgede, Kumendung, Sridadi, Pandean, Tlogomojo, Kasreman, Punjulharjo, Tritunggal, Pasar Banggi, Gedangan, Weton, Ngotet, Mondoteko, Ngadem, Ketanggi, Pulo, Waru, Gegunung Wetan, Sumberjo, Tasikagung, Sawahan, Padaran, Sukoharjo, Kabongan

Lor, Kabongan Kidul, dan Tireman. Selain itu, mencakup 7 kecamatan: Leteh, Sidowayah, Kutoharjo, Magersari, Tanjungsari, Pacar, dan Sawahan.

### **2.3 Gambaran Umum Diskominfo Kabupaten Rembang**

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Rembang beroperasi dalam kerangka peraturan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Rembang Aparat. Secara struktural, Kominfo terdiri dari tiga bidang tugas: Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Sandi.

Ditetapkan sebagai layanan tipe B, struktur organisasi Kominfo mencakup sekretariat dan tiga departemen. Departemen Manajemen Informasi dan Komunikasi (PIKP) membawahi urusan yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika, termasuk publikasi dan hubungan masyarakat. Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Informasi mengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sedangkan Bidang Statistika dan Persandian fokus pada bidang statistika dan perkodean.

Untuk menjalankan fungsinya secara efektif, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mengandalkan tenaga kerja yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan personel non-PNS. Hingga tahun 2022, pelayanan tersebut didukung oleh 33 personel yang tersebar sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan formal:

1. Pendidikan Pasca Sarjana : 7 Orang
2. Pendidikan Sarjana : 18 Orang

- 3. Pendidikan D 4 : - Orang
- 4. Pendidikan D 3 : - Orang
- 5. Pendidikan SMA : 7 Orang
- 6. Pendidikan SMP : 1 Orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan Kepangkatan:

- 1. Golongan IV : 5 Orang
- 2. Golongan III : 22 Orang
- 3. Golongan II : 5 Orang
- 4. Golongan I : 1 Orang
- 5. Non PNS : 14 Orang

c. Jumlah Sarana dan Prasarana:

- 1. Ruang pengaduan pelayanan : 1 (admin 5 Orang)
- 2. Ruang Kepala Diskominfo : 1
- 3. Toilet : 2
- 4. Ruang rapat : 1

### **2.3.1 Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Rembang**

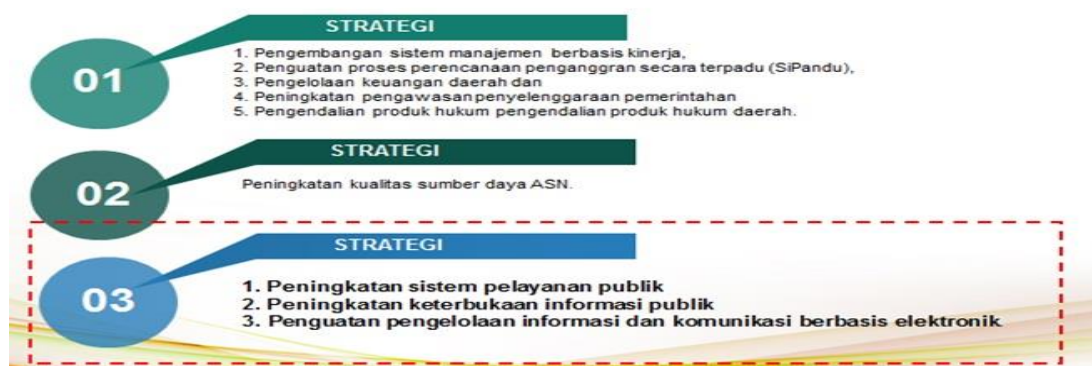
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021 menguraikan Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang diharapkan antara lain adalah kontribusinya dalam mewujudkan Misi Pertama, yang menggarisbawahi tujuan “menciptakan pemerintahan yang bercirikan tanggap, transparan, pemerintahan partisipatif, dan berkeadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip

akuntabel. pemerintahan." Misi menyeluruh ini dirinci lebih lanjut menjadi tujuan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan publik, sebagaimana digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Sumber: <https://dinkominfo.rembangkab.go.id/daftar-informasi-publik/>

Berdasarkan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah merancang serangkaian strategi yang akan dijalankan oleh berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Rembang. Dalam kerangka strategi daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dipercaya untuk melaksanakan strategi nomor 3, sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini.



Sumber: <https://dinkominfo.rembangkab.go.id/daftar-informasi-publik/>





### **2.3.3 Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Rembang**

Fungsi dan peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terletak pada pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik, dan persandian. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik bertanggung jawab atas formulasi kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait pengelolaan informasi, komunikasi publik, dan statistik. Bidang ini melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun konsep kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan pengelolaan informasi, komunikasi publik, dan statistik.
- b. Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan terkait dengan pengelolaan informasi, komunikasi publik, dan statistik.
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik, dan statistik.
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### **Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Rembang Yang Mengelola Aduan Dari Masyarakat**

Bagian Pengelolaan Informasi mempunyai tugas yang beragam, antara lain merumuskan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pengelolaan saluran komunikasi internal di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, mengawasi pengembangan sumber daya komunikasi

publik di Kabupaten, memantau isu-isu publik di media (baik media massa maupun media sosial), memberdayakan komunikasi publik lintas sektoral nasional dan daerah, mengolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik, dan mengelola layanan Pengelolaan Informasi Publik.

Bagian Manajemen Komunikasi Publik bertanggung jawab atas penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan perencanaan komunikasi publik serta pembinaan citra positif pemerintah daerah. Hal ini juga mencakup pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, penyebaran informasi kebijakan melalui berbagai saluran media, pengembangan sumber daya komunikasi publik, pemberdayaan dan penyediaan akses informasi kepada media dan lembaga komunikasi publik, serta pengelolaan hubungan media.

Bagian Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengumpulan, pengolahan, dan analisis data statistik sektoral. Tugasnya meliputi pengembangan meta data statistik sektoral, penyebaran data statistik sektoral, pengembangan infrastruktur statistik sektoral, dan standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral.

Bidang Aplikasi Informatika bertugas menyusun konsep dan melaksanakan kebijakan, serta mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, teknologi informasi, aplikasi, pengkodean, dan keamanan informasi. Sektor ini melakukan fungsi-fungsi berikut:

- 1) Menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan teknis, melakukan pembinaan, dan melaksanakan kegiatan terkait infrastruktur teknologi informasi, aplikasi, serta persandian dan keamanan informasi.
- 2) Mengelola dan menyelenggarakan kegiatan terkait infrastruktur teknologi informasi, aplikasi, serta persandian dan keamanan informasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.
- 3) Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait infrastruktur teknologi informasi, aplikasi, serta persandian dan keamanan informasi.
- 4) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Bagian Infrastruktur Teknologi Informasi bertugas membuat bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pengembangan dan penerapan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC). Selain itu, fokusnya adalah pada inovasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada sistem pemerintahan elektronik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi, seperti layanan Government Cloud Computing. Tanggung jawab lainnya antara lain mengelola interkoneksi jaringan pemerintahan intra-kabupaten, menyediakan infrastruktur dan fasilitas TI pemerintah daerah, mengawasi grafik elektronik di jaringan pemerintah kabupaten, mengelola akses internet pemerintah dan masyarakat, menyaring konten negatif di jaringan pemerintah kabupaten, menyediakan

layanan internet produktif, pemerataan informasi dan layanan teknologi komunikasi, memfasilitasi pengendalian Smart City, dan melakukan audit infrastruktur dan jaringan.

Bagian Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi bertugas menyusun bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan berbagai aspek, termasuk menetapkan standar format data aplikasi, mengelola layanan pemulihan data aplikasi, mengawasi data elektronik pemerintah dan non-pemerintah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik, mengembangkan aplikasi pemerintah dan layanan publik yang terintegrasi, memelihara aplikasi pemerintah dan publik, memfasilitasi layanan interoperabilitas, mendirikan Application Program Interface (API) Center regional, melaksanakan layanan Business Process Reengineering pada pemerintah dan lingkungan non-pemerintah (Stakeholder Smart City), mengelola Sistem Informasi Smart City, menyediakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat, menerapkan Government Chief Information Officer (GCIO) untuk Pemerintah Kabupaten, mengembangkan sumber daya ICT untuk pemerintah Kabupaten dan masyarakat, menyediakan domain dan layanan nama subdomain untuk institusi, layanan publik, dan kegiatan kabupaten, serta audit aplikasi teknologi informasi.

Seksi Enkripsi dan Keamanan Informasi mempunyai tugas mengembangkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelayanan tata kelola keamanan informasi. Tugasnya

antara lain mengelola insiden keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keamanan informasi, mengawasi tata kelola pengkodean untuk keamanan informasi (termasuk pengelolaan informasi rahasia), mengelola sistem sumber daya manusia sandi, mengawasi perangkat lunak dan perangkat keras enkripsi, mengelola jaringan komunikasi kata sandi. dan melakukan audit keamanan informasi.